



Kebijakan Tak Fokus, Pemulihan Pupus: Tanggapan Terhadap Kinerja Ekonomi Aspek Fiskal

Dr. M. Rizal Taufikurahman

Disampaikan pada Press Release INDEF
Jakarta, 8 Februari 2022

Materi Paparan

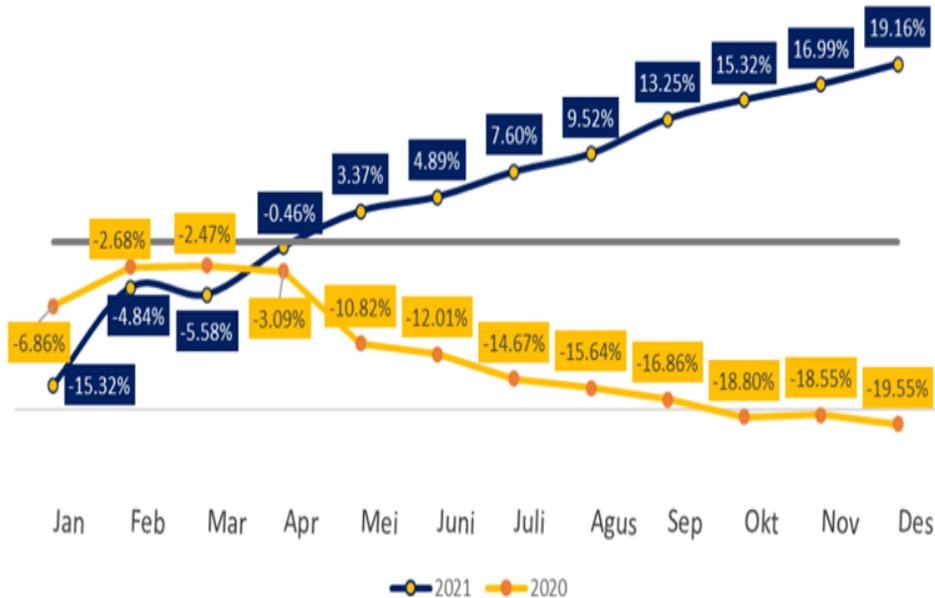
Penerimaan Negara

Belanja Negara

Dampak Kebijakan PEN
terhadap Perekonomian

Penerimaan Negara

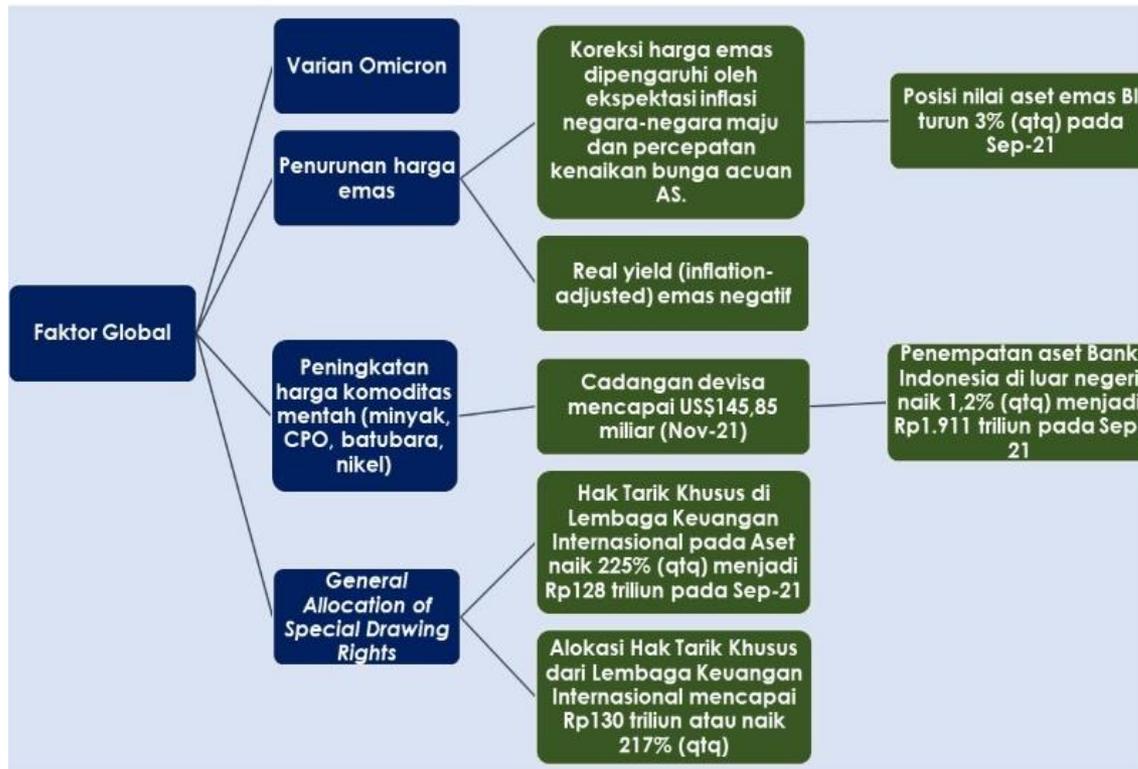
Penerimaan negara meningkat ditopang kenaikan harga komoditas.



Sumber: APBN Kita 2021 Kementerian Keuangan, Januari 2022

- Ketercapaian penerimaan pajak 2021 diperkirakan mencapai Rp1.231,87 triliun atau 100,19% naik dari target APBN 2021 sebesar Rp1.229,6 triliun. Capaian ini belum menggambarkan sepenuhnya pergerakan dan akselerasi aktivitas dan kinerja ekonomi dan struktur ekonomi domestik. Namun capaian tersebut karena adanya kenaikan harga komoditas dan energi yang tinggi di pasar internasional.
- Penerimaan pajak dihasilkan dari kegiatan perdagangan dunia akibat tingginya harga komoditi dan energi naik yang kondisinya masih sangat rentan dan tidak stabil. Masih sangat tergantung pada kondisi pasar dunia yang sifatnya jangka pendek dan tidak sustain. Sebatas mendapatkan berkah (*withdraw profit*).

Determinan Pergerakan Neraca Keuangan dan Komponen Utama Nilai Ekspor (%)



Komponen Utama Nilai Ekspor Indonesia (%)

	Pangsa	Kelompok
Batubara	12.91	Hasil Pertambangan
Produk logam dasar	12.80	Hasil Manufaktur
Minyak sawit	11.90	Hasil Manufaktur
Tekstil dan produk tekstil	5.63	Hasil Manufaktur
Peralatan listrik, alat ukur dan optik	5.06	Hasil Manufaktur
Karet olahan	3.02	Hasil Manufaktur
Gas alam	2.96	Hasil Pertambangan
Bahan kimia	2.87	Hasil Manufaktur
Biji tembaga	2.30	Hasil Pertambangan
Produk kayu olahan	1.94	Hasil Manufaktur
Minyak mentah	1.45	Hasil Pertambangan

20% nilai ekspor Januari-Oktober merupakan komoditas hasil pertambangan.

Belanja Negara

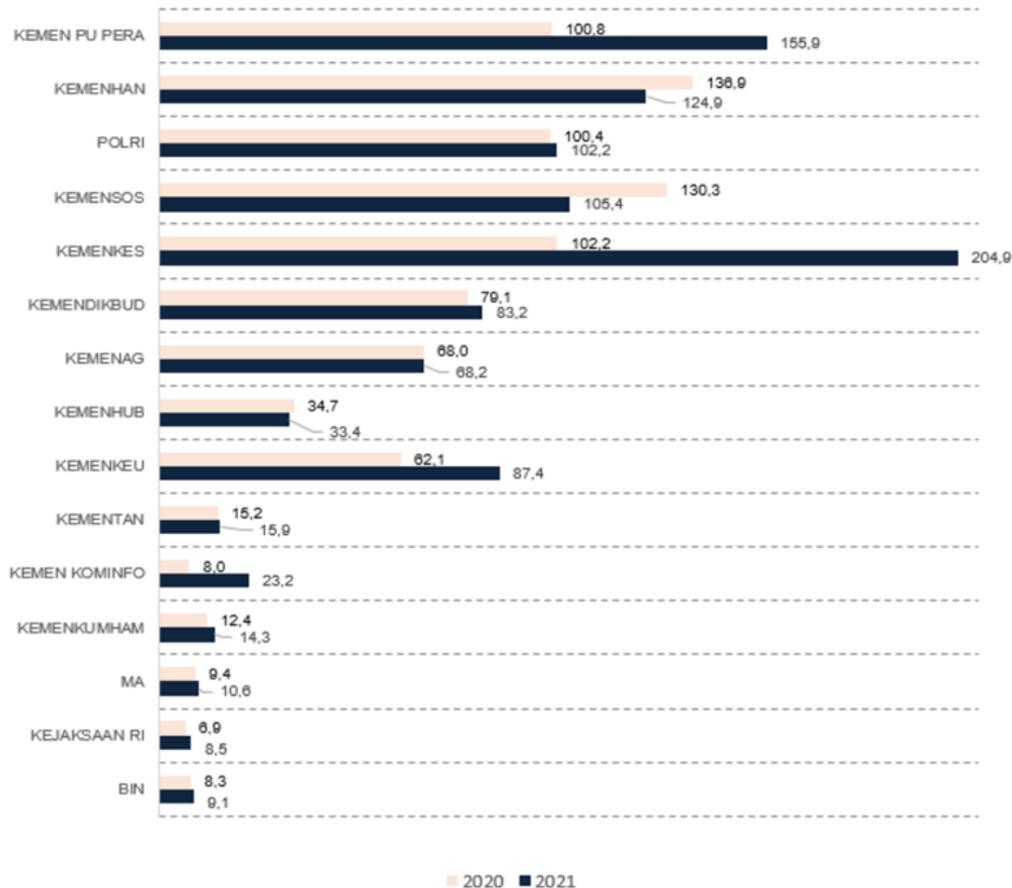
URAIAN	2021		
	APBN	Realisasi Sementara	% thd APBN
A. PENDAPATAN NEGARA	1.743,65	2.003,06	114,88
I. PENDAPATAN DALAM NEGERI	1.742,75	1.998,49	114,67
1. Penerimaan Perpajakan	1.444,54	1.546,51	107,06
2. Penerimaan Negara Bukan Pajak	298,20	451,98	151,57
II. PENERIMAAN HIBAH	0,90	4,57	506,23
B. BELANJA NEGARA	2.750,03	2.786,76	101,34
I. BELANJA PEMERINTAH PUSAT	1.954,55	2.001,06	102,38
1. Belanja K/L	1.031,96	1.189,09	115,23
2. Belanja Non K/L	922,59	811,97	88,01
II. TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA	795,48	785,71	98,77
1. Transfer ke Daerah	723,48	713,85	98,67
2. Dana Desa	72,00	71,85	99,80
C. KESEIMBANGAN PRIMER	(633,12)	(440,21)	69,53
D. SURPLUS/ (DEFISIT) ANGGARAN (A - B)	(1.006,38)	(783,70)	77,87
% Surplus/ (Defisit) Anggaran terhadap PDB	(5,70)	(4,65)	
E. PEMBIAYAAN ANGGARAN	1.006,38	868,63	86,31
KELEBIHAN/(KEKURANGAN) PEMBIAYAAN ANGGARAN	-	84,93	-

*) Angka bersifat sementara, realisasi final akan disajikan dalam LKPP Tahun 2021 (Audited)

- Realisasi belanja negara pada tahun 2021 sebesar Rp2.786,8 triliun atau 101,3 persen di atas target APBN 2021 yang sebesar Rp2.750 triliun. Artinya realisasi belanja ini tumbuh 7,4 persen secara *year-on-year (yoy)*, dari posisi tahun 2020 sebesar Rp2.595,5 triliun. Belanja pemerintah pusat yang menjadi *countercyclical* dengan penyumbang terbesar adalah belanja Kementerian/Lembaga (K/L) sebesar Rp1.189,1 triliun.
- Angka ini menunjukkan bahwa realisasi kinerja belanja pusat melampaui dari target 2021 dan tumbuh dari tahun lalu *year-on-year (yoy)*, sebesar 12,2 persen. Capaian realisasi tersebut seyogyanya tetap menjadi indikator melihat efektifitas fiskal terhadap pemulihan dan pertumbuhan ekonomi nasional. Terutama berkaitan dengan alokasi dana PEN sebagai upaya pemerintah untuk menangani dampak pandemi COVID-19.

Sumber: APBN Kita 2021 Kementerian Keuangan, Januari 2022

Belanja Negara (2)



Sumber: APBN Kita 2021 Kementerian Keuangan, Januari 2022

- Belanja pemerintah pusat dilihat dari perspektif alokasi organisasi untuk belanja 15 kementerian dengan pagu terbesar.
- Realisasi belanja K/L ini mencapai 88,05 persen dari total realisasi belanja K/L. Utamanya didorong oleh realisasi Kementerian Kesehatan, yang tumbuh 100,4 persen sebagai bentuk respon pemerintah bidang kesehatan atas pandemi covid-19, untuk klaim pasien, program vaksinasi, dan insentif tenaga kesehatan. Selain itu, peningkatan kinerja belanja K/L juga didorong oleh K/L bidang infrastruktur seperti Kementerian PUPR.

Realisasi, Distribusi dan Akselerasi PEN

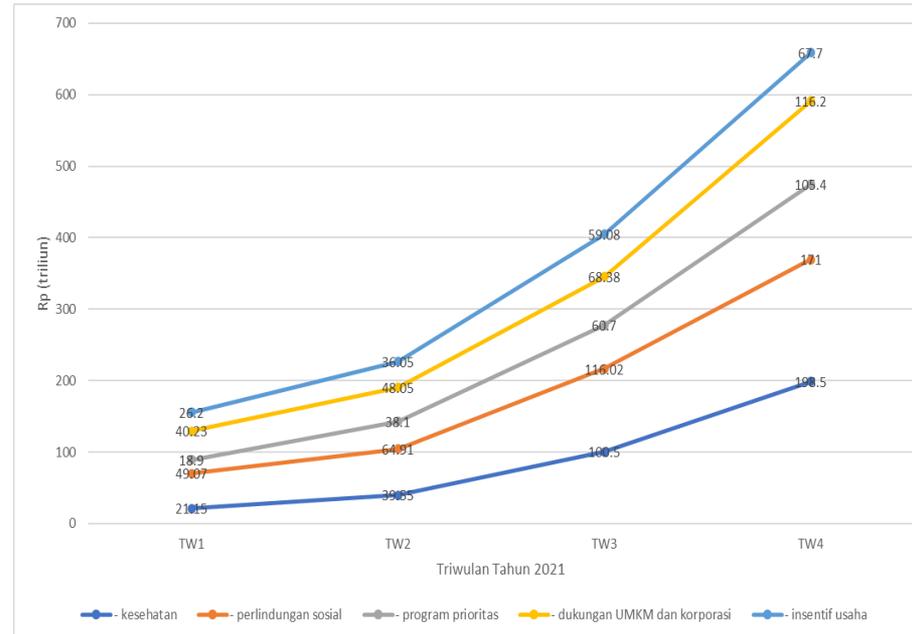
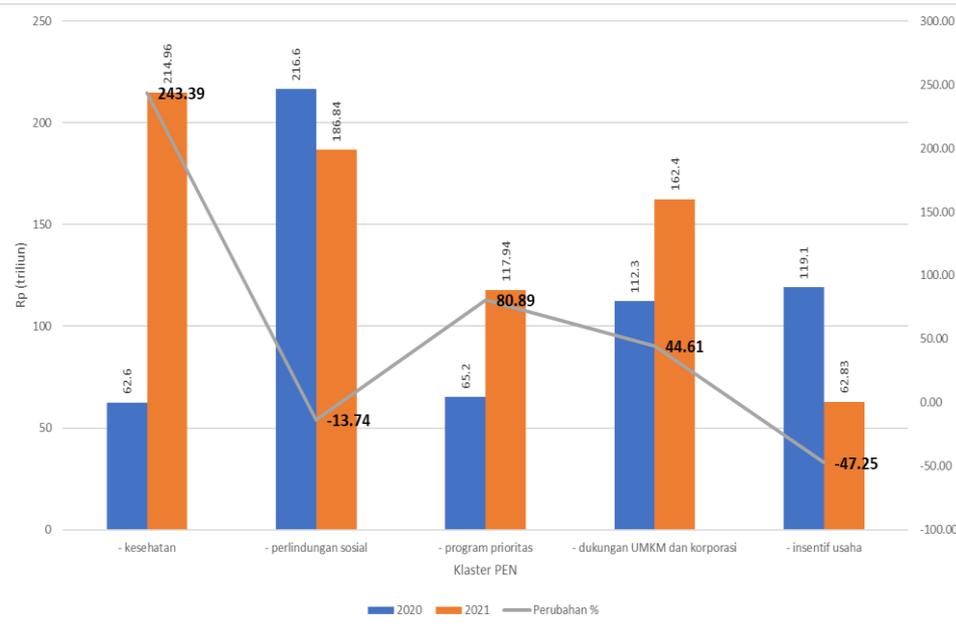


Realisasi Belanja Negara dan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) meningkat

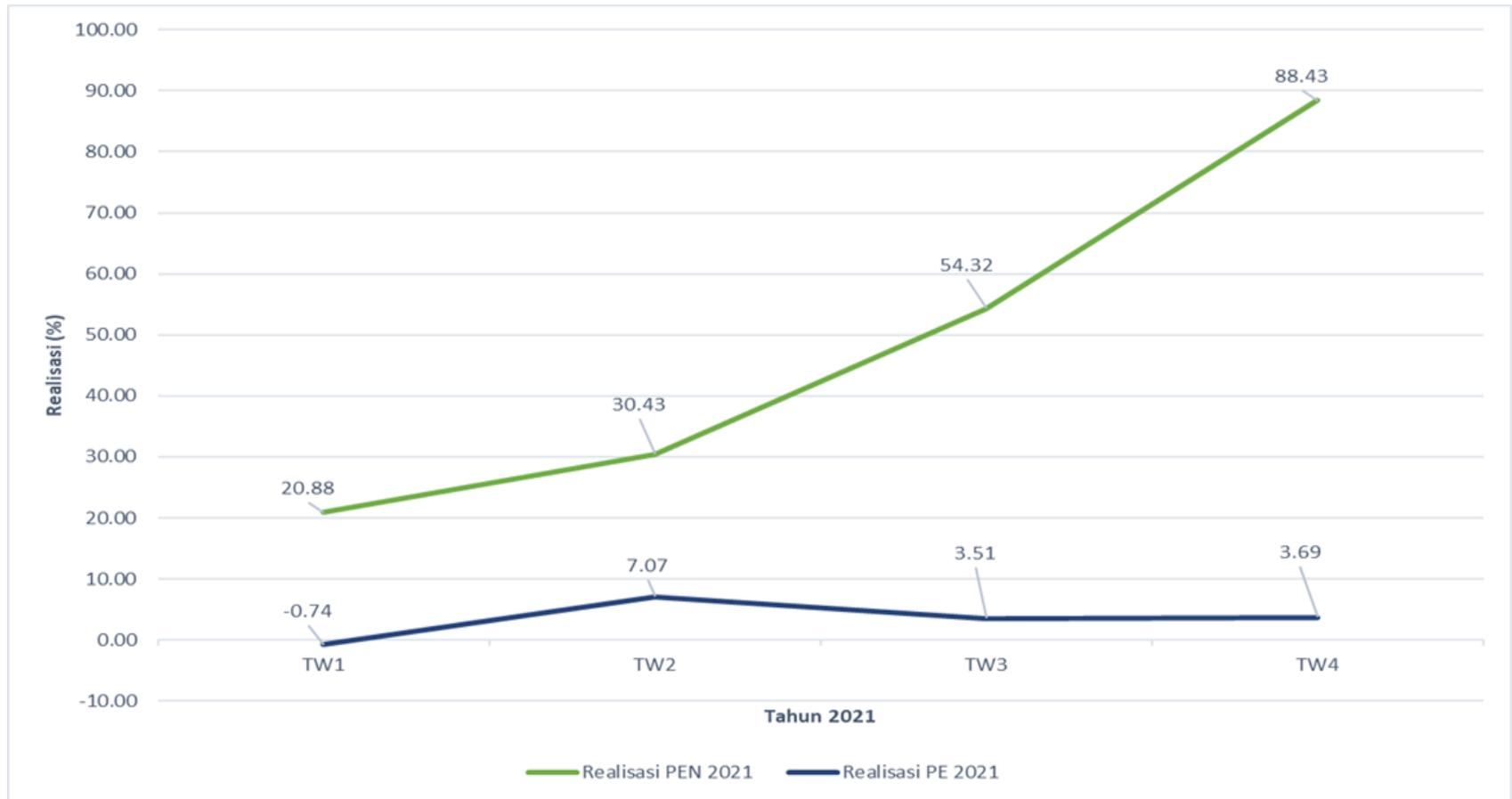
- Realisasi belanja pegawai turun 0,9 persen (*q-to-q*) dan naik 2,7 persen (*y-on-y*)
- Realisasi belanja barang dan jasa naik 72,8 persen (*q-to-q*) dan naik 25,1 persen (*y-on-y*)
- Realisasi belanja modal naik 133,7 persen (*q-to-q*) dan naik 10,6 persen (*y-on-y*)
- Realisasi bantuan sosial naik 43,5 persen (*q-to-q*) dan naik 23,5 persen (*y-on-y*)

Program PEN

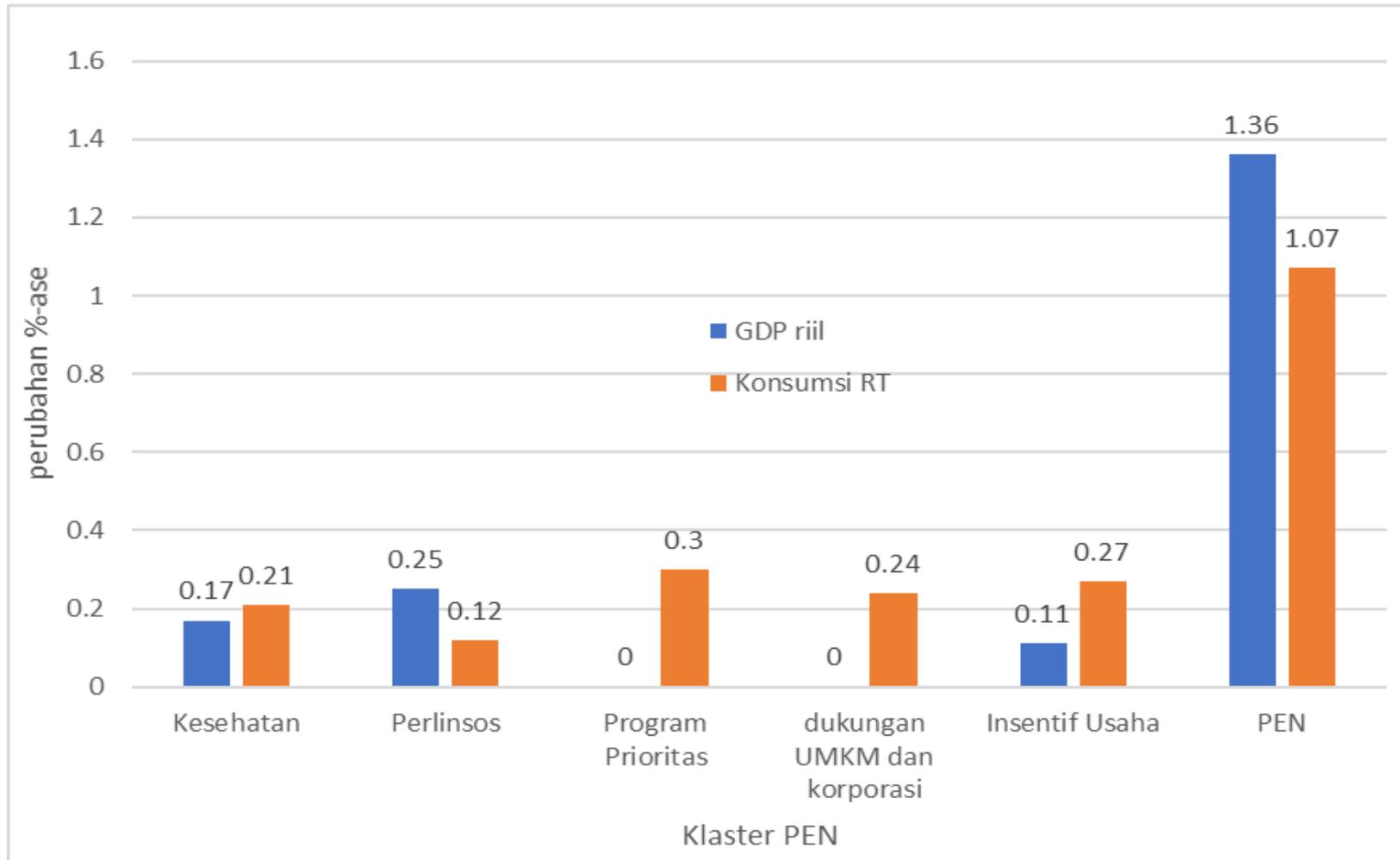
- Realisasi program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) pada Triwulan 4-2021 naik sebesar 55,2 persen (*q-to-q*) dan turun 10,1 persen (*y-on-y*).



Komparasi Realisasi PEN dengan PE



Dampak Kebijakan PEN terhadap PE





Terima Kasih

M. Rizal Taufikurahman

rizal@indef.or.id

[081310209021](tel:081310209021)